

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Identitas Subjek Penelitian Berdasarkan Letak Geografis**

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara  $107^{\circ}30'$  –  $107^{\circ}40'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}25'$  –  $6^{\circ}45'$  Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barat dan Kabupaten Cianjur

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat  $971,72 \text{ km}^2$  atau sekitar 2,81 persen dari luas Wilayah Provinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2001 Kabupaten Purwakarta mempunyai 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Jarak antar Kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km terdapat antara

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kecamatan Sukatani dengan Kecamatan Plered. Sementara jarak terjauh adaah 60 km yang terdapat antara Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari.

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cikao, Purwakarta, Babancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Jatiluhur mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta Bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan, dan Kecamatan Bojong dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl.

#### **4.1.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta**

Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta.

Pada DPRD Kab. Purwakarta terdapat empat komisi, yaitu : 1) Komisi I untuk Bidang Pemerintahan dan Perundang-Undangan, 2) Komisi II untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, 3) Komisi III untuk Bidang Pembangunan, dan 4)

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Komisi IV untuk Bidang Berikut nama-nama anggota DPRD Kab. Purwakarta periode jabatan 2009/2014:

**Tabel 4.1**  
**Susunan Keanggotaan DPRD Kab. Purwakarta Periode Jabatan 2009-2014**

No.	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Ucok Ujang Wardi	Ketua DPRD	Golkar
2	Dadang Burhanudin	Wk. Ketua DPRD	Demokrat
3	R. Deddy Herawan S, S. AP	Wk. Ketua DPRD	PDI-P
4	Hasanudin, S.Sos	Wk. Ketua DPRD	PPP
5	Hj. Ida Mardiana	Anggota	Golkar
6	H. Komarudin, SH, MH	Anggota	Golkar
7	Yudilaga	Anggota	Golkar
8	Hj. Enah Rohanah	Anggota	Golkar
9	Rahmat Budi Mulyawan	Anggota	Golkar
10	H. Lalam Martakusumah, SE, Msi	Anggota	Golkar
11	H. Achmad Dimiyati	Anggota	Golkar
12	Hendra Gunawan	Anggota	Golkar
13	Hj. Dian Kencana, M.Pd, MM	Anggota	Golkar
14	H. Engkos Kosasih	Anggota	Golkar
15	Haerul Amin	Anggota	Demokrat
16	Nurhasanah	Anggota	Demokrat
17	Iin Salamirah	Anggota	Demokrat

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No.	Nama	Jabatan	Fraksi
18	Mastur	Anggota	Demokrat
19	H. M Undia	Anggota	Demokrat
20	H. Eno Sukarna	Anggota	Demokrat
21	Drs. M. Alwi Dhani L	Anggota	Demokrat
22	H. Eman Sulaeman	Anggota	PDI-P
23	Linda Nudiana, Amd	Anggota	PDI-P
24	H. Ujang Kardiwan	Anggota	PDI-P
25	Sutisna, SH	Anggota	PDI-P
26	Yetti Nurhayati	Anggota	PDI-P
27	H. Egi Hadianto Soeryo	Anggota	PPP
28	H. Edi Purwadiraharja	Anggota	PPP
29	Gandiwiria	Anggota	PPP
30	H. Abdul Razak Sanusi	Anggota	PPP
31	Asep Amidin, SE	Anggota	PAN
32	Ragil Sukamto	Anggota	PAN
33	Hari Kristiawan, Amd	Anggota	PAN
34	Dadang Sudirman ER, SE, MM	Anggota	PAN
35	Hj. Neng SuPartini P, S.Ag	Anggota	PKB
36	H. Ahmad Sumitha Sutjana, BE	Anggota	PKB
37	Hidayat S.Th,I	Anggota	PKB
38	H. Asep Saepusin Saepul M	Anggota	PKB
39	Drs. Thoha Mahsun	Anggota	PGNS
40	Fauziah, SH	Anggota	PGNS

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No.	Nama	Jabatan	Fraksi
41	Ir. Hj. Endang Setianingsih	Anggota	PGNS
42	Asep Abdullah	Anggota	PGNS
43	Sri Puji Utami	Anggota	PGNS
44	Yayan Jalaludin	Anggota	PGNS
45	H. Jalal	Anggota	PGNS

Sumber : Sekertariat DPRD

#### 4.2. Deskriptif Data Responden

Objek dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, budaya organisasi, komitmen organisasi, prinsip-prinsip *good governance* dan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan unit analisis adalah badan legislatif Kab. Purwakarta, dan yang menjadi unit observasi adalah anggota badan legislatif (DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai unit observasi yang berkaitan dengan variabel yang diteliti oleh penulis. Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 15 menyebutkan bahwa “DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila”. Dimana DPRD ini mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melaksanakan

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengawasan, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Responden penelitian ini berjumlah 32 orang anggota dewan. Yang dimana dari 32 orang dewan ini mewakili komisi-komisi yang ada di DPRD Kab. Purwakarta. Berikut profil responden penelitian yang disajikan pada Tabel 4.1 yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pengalaman berpolitik, dan pengalaman sebagai anggota DPRD.

**Tabel 4.2**  
**Profil Responden**

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Wanita	8	25 %
Pria	24	75 %
<b>Usia</b>		
≤ 30 Tahun	1	3,1 %
31-40 Tahun	12	37,5 %
41-50 Tahun	17	53,1 %
≥ 51 Tahun	2	6,3 %
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SMA/SMK	16	50%
D1/D2/D3	1	3,1 %
S1	11	34,4 %
S2	4	12,5 %
S3	0	0 %
<b>Pengalaman Politik</b>		
≤ 2 Tahun	5	15,6 %
2-5 Tahun	16	50 %
≥ 5 Tahun	11	34,4
<b>Pengalaman Sebagai Anggota Dewan</b>		
1 Periode	21	65,6 %
2 Periode	11	34,4 %
≥ 2 Periode	0	0 %

*Sumber : Data Penelitian (diolah kembali)*

Sesuai dengan tabel 4.1 tentang profile responden yang mengisi kuesioner penelitian, responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang wanita dan 24 orang pria, dengan persentase wanita 25% dan pria 75%. Dari kategori jenis kelamin, menunjukkan bahwa responden pria jauh lebih banyak untuk ikut berpartisipasi. Hal ini dikarenakan jumlah anggota dewan yang

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berjenis kelamin wanita lebih sedikit dibanding dengan yang berjenis kelamin pria, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2.

Selanjutnya untuk kategori usia, ditemukan satu responden yang berusia dibawah 30 tahun. Sedangkan untuk usia antara 31 sampai dengan 40 tahun ditemukan sebanyak 12 responden atau 37,4% sedangkan yang berusia diantara 41 sampai dengan 50 tahun ada sebanyak 17 responden atau 53,1%. Dan untuk yang berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian berusia lebih dari 51 tahun ditemukan sebanyak 2 orang atau 6,3%. Dari gambaran usia ini, menggambarkan kondisi bahwa yang dapat menjadi anggota dewan adalah yang berusia sekitar 20 tahun sampai dengan 50 tahunan.

Untuk tingkat pendidikan responden yang mempunyai pendidikan terakhir SMA/SMK ditemukan sebanyak 16 orang (50%), D3 sebanyak 1 orang (3,1%), S1 sebanyak 11 orang (34,4%) dan untuk yang S2 sebanyak 4 orang (12,5%). Untuk yang berjenjang S3 tidak ditemukan pada identitas responden yang mengisi kuesioner penelitian. Pada tingkat pendidikan ini terlihat keberanekaragaman jenjang pendidikan anggota dewan dari SMA sampai dengan S2. Hal ini menandakan bahwa untuk menjadi anggota dewan di daerah Kab. Purwakarta bisa di mulai untuk yang mempunyai pendidikan akhir SMA. Selain pendidikan yang mempunyai pengaruh, pengalaman berpolitik pun mempunyai peran penting.

Berikut gambaran mengenai pengalaman berpolitik responden anggota dewan yang mengisi kuesioner penelitian. Ditemukan responden yang mempunyai

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



pengalaman berpolitik selama  $\leq 2$  tahun sebanyak 5 orang (15,6%), 2-5 tahun sebanyak 16 orang (50%), dan yang mempunyai pengalaman  $\geq 5$  tahun ada sebanyak 11 orang anggota dewan (34,4%).

Dan profile yang terakhir ini adalah mengenai pengalaman responden sebagai anggota dewan. Ditemukan sebanyak 21 orang (65,6%) yang mempunyai masa jabatan selama satu periode sebagai anggota dewan, dan sebanyak 11 orang (34,4%) yang mempunyai pengalaman selama dua periode masa jabatan.

### **4.3. Deskripsi Hasil Penelitian**

Sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti, yaitu “Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Prinsip *Good Governance* Sebagai Variabel Pemoderating Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah” maka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti, yaitu variabel *dependen* (Y) atau pengawasan keuangan daerah, variabel *independent* (X) atau pengetahuan dewan tentang anggaran, dan variabel moderating (VM) yang terdiri dari budaya organisasi, komitmen organisasi, dan prinsip *good governance*. Untuk mengetahui gambaran keadaan setiap variabel, peneliti menggunakan skor total dari masing-masing jawaban responden.

#### **4.3.1. Deskripsi Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran**

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Variabel Pengetahuan Dewan ini diambil dari dimensi Anggaran, yang terbagi atas 4 indikator, yaitu pengetahuan terhadap penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, untuk pengawasan guna mengantisipasi kebocoran dalam pelaksanaan APBD dan pengawasan guna mengantisipasi pemborosan atau kegagalan pelaksanaan APBD. Dari keempat indikator tersebut, dijabarkan ke dalam 4 pertanyaan kuesioner yang dimana tiap indikator diwakili oleh satu pertanyaan. Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden mengenai pengetahuan dewan tentang anggaran (dapat dilihat dari skor total pada lampiran) berikut merupakan distribusi frekuensi pengetahuan dewan tentang anggaran :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran**

<b>Kriteria</b>	<b>Interval</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Rendah	20-22	3	9,38
Sedang	23-25	10	31,25
Tinggi	26-28	19	59,38
Jumlah		32	100

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran di DPRD Kab. Purwakarta tergolong tinggi karena sebanyak 19 anggota dewan (59,38%) dari 32 jumlah responden, yang tergolong sedang sebanyak 10 orang responden (31,25%) dan yang tergolong rendah ada sebanyak 3 orang (9,38%). Hal ini menunjukkan bahwa dari 4 item pertanyaan tentang pengetahuan dewan tentang anggaran yang diajukan kepada responden keseluruhan tergolong tinggi. Artinya berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mewakili seluruh anggota dewan di Kab. Purwakarta mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang anggaran.

#### 4.3.2. Deskripsi Variabel Pemoderating (VM)

##### 4.3.2.1. Deskripsi Umum Budaya Organisasi

Variabel budaya organisasi yang ada di lingkungan DPRD Kab. Purwakarta terbagi dalam dua dimensi, yaitu orientasi pada karyawan (*employee oriented*) dan orientasi pada pekerjaan (*job oriented*). Dari dua dimensi tersebut dijabarkan dalam 8 item pertanyaan kuesioner, yang terdiri dari empat item pertanyaan mengenai orientasi pada karyawan (*employee oriented*) dan empat item pertanyaan mengenai orientasi pada pekerjaan (*job oriented*). Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden mengenai budaya organisasi (dapat dilihat dari skor total Lampiran) berikut merupakan distribusi frekuensi budaya organisasi yang ada di lingkungan DPRD Kab. Purwakarta:

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi**

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang Kondusif	41-45	2	6,25
Cukup Kondusif	46-50	13	40,63
Kondusif	51-55	17	53,13
Jumlah		32	100

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 53,13% dari 32 anggota dewan yang berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian menyatakan bahwa budaya organisasi yang ada di lingkungan DPRD Kab. Purwakarta dinyatakan kondusif.

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dan sisanya 40,63% dan 6,25% dari responden yang mengisi kuesioner menyatakan bahwa budaya organisasi yang ada di lingkungan DPRD Kab. Purwakarta kurang kondusif dan cukup kondusif. Kondusif dalam hal ini artikan bahwa budaya dapat memberikan pengaruh yang sesuai atau baik untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan organisasi, dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah DPRD yang ada di Kab. Purwakarta.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi mengisi pertanyaan kuesioner mengenai budaya organisasi yang ada di lingkungan DPRD Kab. Purwakarta ini menyatakan berada pada kategori kondusif.

#### **4.3.2.2. Deskripsi Umum Komitmen Organisasi**

Gambaran mengenai komitmen organisasi di DPRD Kab. Purwakarta dapat dilihat lebih jelas dari hasil tanggapan responden terhadap dari hasil yang akan disajikan berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden mengenai komitmen organisasi (dapat dilihat dari skor total pada Lampiran) berikut merupakan distribusi frekuensi komitemn organisasi sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi**

<b>Kriteria</b>	<b>Interval</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Rendah	62-68	2	6,25
Sedang	69-75	12	37,50
Tinggi	76-84	18	56,25
Jumlah		32	100

*Sumber : Data Diolah*

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa komitmen organisasi yang ada pada diri anggota dewan termasuk tinggi, yaitu sebesar 52,25% atau sebanyak 18 orang responden dari 32 responden, dan yang tergolong sedang sebanyak 37,50% atau 12 orang, dan yang tergolong rendah ada sebanyak 6,25% atau 2 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa dari 8 item pertanyaan tentang komitmen organisasi yang diajukan oleh peneliti secara keseluruhan tergolong tinggi. Dengan demikian, berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan bahwa sebagian besar responden yang mewakili seluruh anggota DPRD Kab. Purwakarta memiliki komitmen organisasi yang tinggi.

#### **4.3.2.3. Deskripsi Umum Prinsip *Good Governance***

##### **4.3.2.3.1. Deskripsi Umum Akuntabilitas Publik**

Untuk gambaran mengenai akuntabilitas publik, tahap pembuatan keputusan dan tahap sosialisasi menjadi dimensi untuk pertanyaan kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Dari kedua dimensi ini diwakili oleh 14 pertanyaan. Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden mengenai akuntabilitas publik (dapat dilihat dari skor total pada Lampiran) berikut merupakan distribusi frekuensi akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi Akuntabilitas Publik**

<b>Kriteria</b>	<b>Interval</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kurang Akuntabel	82-87	4	12,50
Cukup Akuntabel	88-93	17	53,13

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Akuntabel	94-98	11	34,38
Jumlah		32	100

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa akuntabilitas publik atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD dinyatakan cukup akuntabel menurut 17 orang responden (53,13%). Dan menurut 4 orang responden (12,50%), dan 11 orang responden (53,13%) dinyatakan kurang akuntabel dan akuntabel. Dan jika dilihat dari tabel 4.6 diatas, perbandingan antara responden yang menyatakan akuntabilitas publik ini cukup akuntabel dan akuntabel memiliki perbandingan yang tipis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebaian besar data mengenai akuntabilitas publik yang dilakukan oleh DPRD Kab. Purwakarta dinyatakan cukup akuntabel atas semua kebijakan dan sosialisasi.

#### **4.3.2.3.2. Deskripsi Umum Partisipasi Masyarakat**

Gambaran mengenai partisipasi masyarakat atas APBD dan pengawasan keuangan daerah dapat dilihat jelas dari hasil tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti melalui kuesioner dengan 7 item pertanyaan. Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden mengenai partisipasi masyarakat (dapat dilihat dari skor total pada Lampiran) berikut merupakan distribusi frekuensi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7**

#### **Distribusi Frekuensi Partisipasi Masyarakat**

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

<b>Kriteria</b>	<b>Interval</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Rendah	21-30	1	3,13
Sedang	31-40	12	37,50
Tinggi	41-49	19	59,38
Jumlah		32	100

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD sampai dengan pengawasan yang dilakukan anggota dewan tergolong tinggi dengan presentasi 59,38% atau sebanyak 19 orang responden yang menyatakan pendapatnya demikian. Sisanya sebanyak 3,13% (1 orang) dan 37,50% (12 orang) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang rendah dan cukup terhadap hubungan anggaran dan pengawasan APBD. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar data menunjukkan masyarakat ikut andil atau berperan atas APBD dan pengawasan yang dilakukan oleh badan legislatif untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan.

#### **4.3.2.3.3. Deskripsi Umum Transparansi Kebijakan Publik**

Selanjutnya adalah untuk mengetahui gambaran mengenai transparansi kebijakan publik dapat dilihat jelas dari hasil tanggapan responden terhadap lima pertanyaan kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden mengenai transparansi kebijakan publik (dapat dilihat dari skor total pada Lampiran) berikut merupakan distribusi frekuensi transparansi kebijakan publik :

**Tabel 4.8**

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### Distribusi Frekuensi Transparansi Kebijakan Publik

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang Transparan	19-24	2	6,25
Cukup Transparan	25-30	12	21,88
Transparan	31-35	23	71,88
Jumlah		32	100

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.8 yang menggambarkan distribusi frekuensi untuk transparansi kebijakan publik, dapat dilihat bahwa transparansi kebijakan yang dilakukan oleh dewan dapat dikatakan transparan. Hal ini terlihat dari perolehan hasil jawaban responden sebesar 71,88%, sedangkan untuk 6,25% dan 21,88% menyatakan bahwa kegiatan transparansi yang dilakukan anggota dewan kurang dan cukup transparan. Dengan demikian, berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar data mengenai transparansi yang dilakukan oleh dewan dapat dikatakan berhasil atau transparan kepada publik.

#### 4.3.3. Deskripsi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) dijabarkan ke dalam 13 item pertanyaan. Dari 13 item pertanyaan itu mewakili 3 indikator pendukung. Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden mengenai pengawasan keuangan daerah (APBD) (dapat dilihat dari skor total pada Lampiran) berikut merupakan distribusi frekuensi variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) :

**Tabel 4.9**

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



### Distribusi Frekuensi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang efektif	71-77	6	18,75
Cukup efektif	78-83	10	31,25
Efektif	84-89	16	50
Jumlah		32	100

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dikategorikan ke dalam kategori efektif. Hal ini berdasarkan hasil jawaban 16 orang responden (50%) yang menyatakan demikian. Sedangkan untuk sisanya yang sebanyak 6 orang responden (18,75%) dan 10 orang responden (31,25%) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan kurang efektif dan cukup efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner yang berkaitan tentang variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) menyatakan bahwa pengawasan berlangsung secara efektif.

#### 4.4. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian

##### 4.4.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan peneliti terdiri dari: Uji Normalitas, Uji Linearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinearitas. Hasil pengujian untuk uji normalitas yang menggunakan uji statistik *Kolmogorov-smirnov (K-S)* menyatakan bahwa data residual untuk variabel pengetahuan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan *software SPSS 20*. Untuk lebih jelas, dapat dilihat kembali pada taembl 3.19 dan tabel 3.20

Selanjutnya untuk uji linearitas antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa antara kedua variabel ini memenuhi syarat linearitas. Karena pada ouput menunjukkan nilai signifikasi pada linearitas sebesar 0,000. Untuk lebih jelas, dapat dilihat kembali tabel 3.21 untuk uji linearitas ini.

Untuk uji heteroskedastisitas, dari hasil output pada tabel 3.22 menunjukkan bahwa nilai (Sig) > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang ada pada output itu tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Dan untuk uji multikolinearitas, peneliti menggunakan menggunakan metode dengan melihat nilai *variance inflation factor (VIF)* < 10 pada regresi dan nilai *tolerance* > 0,10 dengan bantuan *software SPSS 20.0*. Dan hasil output uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 3.23, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang ada pada output tidak terjadi multikolinearitas.

#### **4.4.2. Pengujian Hipotesis Penelitian**

Setelah diketahui bahwa data-data dalam penelitian ini memenuhi persyaratan seperti pada pengujian-pengujian sebelumnya, maka selanjutnya diadakan dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah disusun oleh peneliti.

Berikut pengujian terhadap hipotesis:

##### **4.4.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama**

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pengujian hipotesis pertama ini untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu mengetahui hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linear sederhana, dan pengolahan data menggunakan bantuan *Software SPSS 20*:

**Tabel 4.10**  
**Analisis Regresi Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.160	8.689		4.507	.000
	PDTA	1.618	.334	.663	4.846	.000

a. Dependent Variable: PKD

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear sederhana yang tercantum pada tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai  $a$  adalah positif 39,160 dan untuk nilai koefisien regresi ( $b$ ) adalah sebesar positif 1,618. Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil output tersebut, maka model regresi linear sederhana dapat di gambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

$$Y = 39,160 + 1,618X_1 + e$$

Dari persamaan diatas diperoleh bahwa nilai  $a$  adalah 39,160. Artinya, jika variabel *dependen* (pengawasan keuangan daerah) tidak dipengaruhi oleh variabel *independent*-nya (pengetahuan dewan tentang anggaran), maka besar

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rata-rata untuk variabel *dependen* adalah sebesar 39,160. Sedangkan tanda koefisien regresi variabel independent menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan variabel dependen-nya. Nilai positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara  $X_1$  dengan Y. Ini berarti untuk setiap peningkatan  $X_1$  (pengetahuan dewan tentang anggaran) sebesar 1,618 akan menyebabkan peningkatan Y (pengawasan keuangan daerah) sebesar 1,618 pula.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar varian dari variabel  $X_1$  (pengetahuan dewan tentang anggaran) dengan Y (pengawasan keuangan daerah) dapat dilihat dari koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*). Berikut tabel 4.11 yang menunjukkan besaran varian tersebut:

**Tabel 4.11**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran**  
**terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.663 <sup>a</sup>	.439	.420	4.060

a. Predictors: (Constant), PDTA

b. Dependent Variable: PKD

Sumber : *Data Diolah*

Hasil uji koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) menunjukkan pada angka 0,420. Artinya, variabel independent atau variabel pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai keterikatan 0,420 atau 42% terhadap variabel dependent atau variabel pengawasan keuangan daerah (APBD), dan sisanya sebesar 58% dipengaruhi oleh faktor/variabel lain.

Uji-F Statistik dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel independen untuk dapat/mampu menjelaskan dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keberagaman variabel. Tabel berikut dapat menunjukkan uji-F ini:

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji F Statistik antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran**  
**terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	387.087	1	387.087	23.488	.000 <sup>b</sup>
	Residual	494.413	30	16.480		
	Total	881.500	31			

a. Dependent Variable: PKD

b. Predictors: (Constant), PDTA

*Sumber : Data Diolah*

Hasil uji ANOVA atau F test /  $F_{hitung}$  di dapat nilai sebesar 23,488 dengan (Sig) 0,000, sedangkan  $F_{tabel}$  menunjuk kepada angka 2,490. Hal ini berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai (Sig) 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya variabel independen (pengetahuan dewan tentang anggaran) berpengaruh pada variabel pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengujian terakhir untuk hipotesis pertama ini adalah uji-t (*t-test*) atau uji signifikansi yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel *Coefficients* (lihat tabel 4.10), diketahui bahwa besarnya nilai *t-test* = 4,846 sedangkan besarnya signifikansi = 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  karena  $t_{tabel} = 2,042$ , maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Hal itu berarti, pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

#### 4.4.2.2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua ini untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengetahui pengaruh budaya organisasi yang ada di lingkungan DPRD Kab. Purwakarta terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan bantuan *Software SPSS*:

**Tabel 4.13**

**Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderating**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	235.211	98.774		2.381	.024
	PDTA	-7.495	3.976	-2.989	-1.885	.070
	BO	-3.782	2.062	-2.404	-1.834	.077
	moderated_2	.173	.082	5.537	2.120	.043

a. Dependent Variable: PKD

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan MRA yang tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai  $\alpha$  adalah 235,211. Untuk nilai koefisien regresi ( $b_1$ ) variabel pengetahuan dewan tentang anggaran adalah sebesar -7,495, nilai koefisien regresi ( $b_2$ ) variabel budaya organisasi sebesar -3,782 dan nilai koefisien regresi ( $b_3$ ) variabel moderating antara pengetahuan dewan dengan

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



budaya organisasi adalah sebesar 0,173 . Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil output tersebut, maka model regresi linear sederhana dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + e \quad (2)$$

$$Y = 235,211 - 7,495 X_1 - 3,782 X_2 + 0,173 X_1X_2 + e$$

Dari tabel 4.13 dan dari persamaan diatas terlihat nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya yang menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikatnya bisa naik dan bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

Dan jika dilihat pada persamaan regresi linear berganda atau MRA diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 235,211. Artinya, jika variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independennya (pengetahuan dewan tentang anggaran dengan budaya organisasi bernilai nol), maka besar rata-rata pengawasan keuangan daerah (APBD) akan bernilai 235,211.

Tanda koefisien regresi variabel menunjukkan arah hubungan variabel yang bersangkutan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Koefisien regresi untuk variabel  $X_1$  bernilai negatif, menunjukkan tidak adanya hubungan yang searah untuk antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel  $Y$ . Nilai koefisien regresi ini ditunjukkan oleh angka sebesar 7,495 mempunyai arti bahwa untuk setiap

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kenaikan pengetahuan dewan tentang anggaran  $X_1$  sebesar satu-satuan akan menyebabkan menurunnya pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar 7,495.

Koefisien regresi untuk variabel independen kedua ( $X_2$ ) menunjukkan nilai yang sama yaitu negatif. Yang berarti mempunyai arti yang sama dengan variabel  $X_1$ , tidak menunjukkan adanya hubungan yang searah antara budaya organisasi dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel dependennya. Nilai dari koefisien regresi untuk  $X_2$  adalah 3,782, dimana angka ini mempunyai arti untuk setiap kenaikan variabel budaya organisasi sebesar satu-satuan, maka akan terjadi penurunan untuk variabel dependennya atau variabel pengawasan keuangan daerah sebesar nilai koefisien regresinya sebesar 3,782.

Tanda koefisien regresi untuk variabel moderator  $X_1X_2$  bernilai positif dengan nilai 0,173. Hal ini menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi memberikan penguatan untuk hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dan untuk setiap pertambahan budaya organisasi ( $X_2$ ) sebesar satu-satuan akan menyebabkan bertambahnya pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_1$ ) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 0,173.

**Tabel 4.14**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di Moderasi Oleh Budaya Organisasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749	.560	.547	1.491

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1	.696 <sup>a</sup>	.484	.429	4.138
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), moderated\_2, BO, PDTA

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.14, diketahui nilai koefisien determinasi (adjusted  $R^2$ ) sebesar 0,429 atau 42,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan budaya organisasi sebagai variabel pemoderating mempunyai pengaruh sebesar 42,9% dan sisinya sebesar (100% - 42,9%) 57,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 4.15**  
**Uji F Statistik Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di Moderasi Oleh Budaya Organisasi**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	450.228	3	150.076	8.764	.000 <sup>b</sup>
	Residual	479.491	28	17.125		
	Total	929.719	31			

a. Dependent Variable: PKD

b. Predictors: (Constant), moderated\_2, BO, PDTA

Sumber : Data Diolah

Hasil uji F didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 8,764 dengan (Sig) 0,000. Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  menunjuk kepada angka 2,490. Karena (Sig) yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya secara bersama-sama variabel independen dengan variabel pemoderatingnya (pengetahuan dewan tentang anggaran dengan budaya organisasi) mempengaruhi variabel dependennya (pengawasan keuangan daerah).

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Uji-t (*t-test*) atau uji signifikansi yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel *Coefficients* (lihat tabel 4.13), diketahui bahwa besarnya nilai *t-test* = 2,120 dan  $t_{\text{tabel}}$  bernilai 2,042, sedangkan besarnya signifikansi = 0,043 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Hal itu berarti, pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi oleh budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

#### 4.4.2.3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga ini untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu mengetahui pengaruh komitmen organisasi setiap anggota dewan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan bantuan *Software SPSS 20* :

**Tabel 4.16**

**Analisis Moderated Regression Analysis (MRA) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderating**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	188.601	80.172		2.352	.026
	PDTA	-5.904	3.129	-2.450	-1.887	.070
	KO	-1.752	1.094	-1.968	-1.602	.120
	moderated_3	.090	.042	4.705	2.134	.042

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

a. Dependent Variable: PKD  
 Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan MRA pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai  $\alpha$  adalah 188,601. Untuk nilai koefisien regresi ( $b_1$ ) variabel pengetahuan dewan tentang anggaran adalah sebesar -5,904, nilai koefisien regresi ( $b_4$ ) variabel komitmen organisasi dinyatakan dalam nilai -1,752, dan nilai koefisien regresi ( $b_5$ ) untuk variabel pemoderating antara pengetahuan dewan dengan komitmen organisasi adalah sebesar 0,090 . Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil output tersebut, maka model regresi linear dapat di gambarkan dengan persamaan sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_4X_3 + b_5X_1X_3 + e \quad (3)$$

$$Y = 188,601 - 5,904 X_1 - 1,752 X_3 + 0,090 X_1X_3 + e$$

Dari tabel 4.16 dan dari persamaan diatas terlihat nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya yang menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan kosntan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikatnya bisa naik dan bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

Dan jika dilihat pada persamaan MRA diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 188,601. Artinya, jika variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independennya (pengetahuan dewan tentang anggaran dengan budaya organisasi bernilai nol), maka besar rata-rata pengawasan keuangan daerah (APBD) akan bernilai 188,601.

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tanda koefisien regresi variabel menunjukkan arah hubungan variabel yang bersangkutan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Koefisien regresi untuk variabel  $X_1$  bernilai negatif, menunjukkan tidak adanya hubungan yang searah untuk antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel  $Y$ . Nilai koefisien regresi ini ditunjukkan oleh angka sebesar 5,904 mengandung arti untuk setiap kenaikan pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_1$ ) sebesar satu-satuan akan menyebabkan menurunnya pengawasan keuangandaerah (APBD) sebesar 5,904.

Koefisien regresi untuk variabel independen ( $X_3$ ) menunjukkan nilai yang sama yaitu negatif. Yang berarti mempunyai arti yang sama dengan variabel  $X_1$ , tidak menunjukkan adanya hubungan yang searah antara komitmen organisasi dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel dependennya. Nilai dari koefisien regresi untuk  $X_3$  adalah 1,752, dimana angka ini mempunyai arti untuk setiap kenaikan variabel komitmen organisasi sebesar satu-satuan, maka akan terjadi penurunan untuk variabel dependennya atau variabel pengawasan keuangan daerah sebesar nilai koefisien regresinya sebesar 1,752.

Tanda koefisien regresi untuk variabel moderator  $X_1X_3$  bernilai positif dengan nilai 0,090. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memberikan penguatan untuk hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dan untuk setiap pertambahan komitmen organisasi ( $X_3$ ) sebesar satu-satuan akan menyebabkan bertambahnya pengaruh

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_1$ ) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 0,090.

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Tabel 4.17**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan**  
**Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di**  
**Moderasi Oleh Komitmen Organisasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873 <sup>a</sup>	.762	.737	2.699

a. Predictors: (Constant), moderated\_3, KO, PDTA  
 Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.17, diketahui nilai koefisien determinasi (*adjusted*  $R^2$ ) sebesar 0,737 atau 73,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan budaya organisasi sebagai variabel pemoderating mempunyai pengaruh sebesar 73,7% dan sisinya sebesar 26,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 4.18**  
**Uji F Statistik Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran**  
**terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di Moderasi Oleh**  
**Komitmen Organisasi**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	654.432	3	218.144	29.936	.000 <sup>b</sup>
	Residual	204.036	28	7.287		
	Total	858.469	31			

a. Dependent Variable: PKD  
 b. Predictors: (Constant), moderated\_3, KO, PDTA  
 Sumber : Data Diolah

Hasil uji F didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 29,936 dengan (Sig) 0,000 dan untuk nilai  $F_{tabel}$  menunjuk kepada angka 2,490. Karena (Sig) yang diperoleh lebih



kecil dari 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  , artinya model yang digunakan dapat dipakai secara bersama-sama untuk menjelaskan variasi variabel independen (pengetahuan dewan tentang anggaran) dan variabel moderat (komitmen organisasi) mampu menjelaskan keragaman variabel dependen (pengawasan keuangan daerah/APBD).

Pengujian terakhir untuk hipotesis yang kedua ini adalah uji-t (*t-test*) atau uji signifikansi. Berdasarkan tabel *Coefficients* (lihat tabel 4.16), diketahui bahwa besarnya nilai *t-test* = 2,134 dan  $t_{tabel}$  bernilai 2,042, sedangkan besarnya signifikansi = 0,042 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Hal itu berarti, pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi oleh komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

#### **4.4.2.4. Pengujian Hipotesis Keempat**

Pengujian hipotesis keempat ini untuk menjawab rumusan masalah keempat yaitu mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan bantuan *Software SPSS*:

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 4.19

**Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderating**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	343.903	142.634		2.411	.023
	PDTA	-12.762	5.541	-5.572	-2.303	.029
	AKP	-3.108	1.595	-2.603	-1.948	.061
	moderated_4	.148	.062	8.135	2.405	.023

a. Dependent Variable: PKD  
 Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai  $\alpha$  adalah 343,903. Untuk nilai koefisien regresi ( $b_1$ ) variabel pengetahuan dewan tentang anggaran adalah sebesar -12,762, nilai koefisien regresi ( $b_6$ ) variabel akuntabilitas publik sebesar -3,108, dan nilai koefisien regresi ( $b_7$ ) variabel pemoderating antara pengetahuan dewan dengan akuntabilitas publik adalah sebesar 0,148 . Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil output tersebut, maka model regresi linear dapat di gambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_6X_4 + b_7X_1X_4 + e \quad (4)$$

$$Y = 343,903 - 12,762 X_1 - 3,106 X_4 + 0,148 X_1X_4 + e$$

Dari persamaan regresi linear diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 343,903. Artinya, jika variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) atau

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independennya (pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik bernilai nol), maka besar rata-rata pengawasan keuangan daerah (APBD) akan bernilai 343,903.

Koefisien regresi untuk variabel  $X_1$  bernilai negatif, menunjukkan tidak adanya hubungan yang searah untuk antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel  $Y$ . Nilai koefisien regresi ini ditunjukkan oleh angka sebesar 12,762 mengandung arti untuk setiap kenaikan pengetahuan dewan tentang anggaran  $X_1$  sebesar satu-satuan akan menyebabkan menurunnya pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar 12,762.

Koefisien regresi untuk variabel independen keempat ( $X_4$ ) menunjukkan nilai yang sama yaitu negatif dan tidak menunjukkan adanya hubungan yang searah antara akuntabilitas publik dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel dependennya. Nilai dari koefisien regresi untuk  $X_4$  adalah 3,106, dimana angka ini mempunyai arti untuk setiap kenaikan variabel akuntabilitas publik sebesar satu-satuan, maka akan terjadi penurunan untuk variabel dependennya atau variabel pengawasan keuangan daerah sebesar nilai koefisien regresinya sebesar 3,106.

Tanda koefisien regresi untuk variabel moderator  $X_1X_4$  bernilai positif dengan nilai 0,148. Hal ini menyatakan bahwa variabel akuntabilitas publik memberikan penguatan untuk hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Setiap penambahan akuntabilitas publik ( $X_4$ ) sebesar satu-satuan akan menyebabkan bertambahnya pengaruh pengetahuan

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dewan tentang anggaran ( $X_1$ ) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 0,148.

**Tabel 4.20**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di Moderasi Oleh Akuntabilitas Publik**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 <sup>a</sup>	.647	.609	3.126

a. Predictors: (Constant), moderated\_4, AKP, PDTA

*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan tabel 4.20, dapat dilihat nilai koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,609 atau 60,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan budaya organisasi sebagai variabel pemoderating mempunyai pengaruh sebesar 60,9% dan sisinya sebesar 39,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 4.21**  
**Uji F Statistik Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di Moderasi Oleh Akuntabilitas Publik**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	502.185	3	167.395	17.125	.000 <sup>b</sup>
	Residual	273.690	28	9.775		
	Total	775.875	31			

a. Dependent Variable: PKD

b. Predictors: (Constant), moderated\_4, AKP, PDTA

*Sumber : Data Diolah*

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil uji F didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 17,125 dengan (Sig) 0,000. Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  menunjuk kepada angka 2,490. Karena (Sig) yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya model penelitian yang digunakan dapat dikatakan layak atau mampu menjelaskan variasi antara hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah/APBD yang dimoderasi oleh akuntabilitas publik secara bersama-sama.

Selanjutnya, berdasarkan tabel *Coefficients* (lihat tabel 4.19), diketahui bahwa besarnya nilai  $t-test = 2,405$  dan  $t_{tabel}$  bernilai 2,042, sedangkan besarnya signifikansi = 0,023 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Hal itu berarti, pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi oleh akuntabilitas publik mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

#### **4.4.2.5. Pengujian Hipotesis Kelima**

Pengujian hipotesis kelima ini untuk menjawab rumusan masalah kelima yaitu mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan bantuan *Software SPSS 20*:

Tabel 4.22

**Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Pemoderating**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	144.632	55.362		2.612	.014
	PDTA	-3.510	2.243	-1.438	-1.565	.129
	PM	-2.181	1.386	-2.283	-1.574	.127
	moderated_5	.109	.055	4.113	1.970	.059

a. Dependent Variable: PKD

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai  $\alpha$  adalah 144,632. Untuk nilai koefisien regresi ( $b_1$ ) variabel pengetahuan dewan tentang anggaran adalah sebesar -3,510, nilai koefisien regresi ( $b_8$ ) variabel partisipasi masyarakat sebesar -2,181 dan nilai koefisien regresi ( $b_9$ ) variabel moderating antara pengetahuan dewan dengan partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,109 . Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil output tersebut, maka model regresi linear dapat di gambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_8X_5 + b_9X_1X_5 + e \quad (5)$$

$$Y = 144,632 - 3,510 X_1 - 2,181 X_5 + 0,109 X_1X_5 + e$$

Dari persamaan diperoleh nilai konstanta sebesar 144,632. Artinya, jika variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel dependen tidak

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dipengaruhi oleh variabel independennya (pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat bernilai nol), maka besar rata-rata pengawasan keuangan daerah (APBD) akan bernilai 144,632.

Koefisien regresi variabel  $X_1$  bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang searah untuk antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel  $Y$ . Nilai koefisien regresi ini ditunjukkan oleh angka sebesar 3,510 mengandung arti untuk setiap kenaikan pengetahuan dewan tentang anggaran  $X_1$  sebesar satu-satuan akan menyebabkan menurunnya pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar 3,510.

Koefisien regresi untuk variabel independen kedua ( $X_5$ ) menunjukkan nilai yang sama yaitu negatif dan tidak menunjukkan adanya hubungan yang searah antara partisipasi masyarakat dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel dependennya. Nilai dari koefisien regresi untuk  $X_5$  adalah 2,181, dimana angka ini mempunyai arti untuk setiap kenaikan variabel partisipasi masyarakat sebesar satu-satuan, maka akan terjadi penurunan untuk variabel dependennya atau variabel pengawasan keuangan daerah sebesar nilai koefisien regresinya sebesar 2,181.

Tanda koefisien regresi untuk variabel moderator  $X_1X_5$  bernilai positif dengan nilai 0,109. Hal ini menyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat memberikan penguatan untuk hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Setiap penambahan partisipasi masyarakat ( $X_5$ ) sebesar satu-satuan akan menyebabkan bertambahnya pengaruh pengetahuan

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dewan tentang anggaran ( $X_1$ ) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 0,109.

**Tabel 4.23**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di Moderasi Oleh Partisipasi Masyarakat**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.839 <sup>a</sup>	.704	.672	3.052

a. Predictors: (Constant), moderated\_5, PDTA, PM

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.23, dapat dilihat nilai koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,672 atau 67,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel pemoderating mempunyai pengaruh sebesar 67,2% dan sisinya sebesar 32,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 4.24**  
**Uji F Statistik Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di Moderasi Oleh Partisipasi Masyarakat**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	620.658	3	206.886	22.208	.000 <sup>b</sup>
	Residual	260.842	28	9.316		
	Total	881.500	31			

a. Dependent Variable: PKD

b. Predictors: (Constant), moderated\_5, PDTA, PM

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



*Sumber : Data Diolah*

Hasil uji F didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 22,2,08 dengan (Sig) 0,000 dan diketahui pula bahwa nilai  $F_{tabel}$  menunjuk kepada angka 2,490. Karena (Sig) yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , model yang digunakan dapat dikatakan layak untuk menjelaskan variasi antara hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah/APBD yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat secara bersama-sama.

Selanjutnya, berdasarkan tabel *Coefficients* (lihat tabel 4.21), diketahui bahwa besarnya nilai  $t-test = 1,970$  dan  $t_{tabel}$  bernilai 2,042, sedangkan besarnya signifikansi = 0,059 lebih besar 0,009 dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh peneliti ditolak. Hal itu berarti, pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

#### **4.4.2.6. Pengujian Hipotesis Keenam**

Pengujian hipotesis yang terakhir ini adalah untuk menjawab rumusan masalah keenam yaitu mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan bantuan *Software SPSS 20*:

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 4.25

**Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderating**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	145.827	72.606		2.008	.054
	PDTA	-3.749	3.012	-1.536	-1.245	.224
	TKP	-2.793	2.432	-1.952	-1.149	.260
	moderated_6	.148	.099	3.979	1.486	.149

a. Dependent Variable: PKD  
 Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang tercantum pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai  $\alpha$  adalah 145,827. Untuk nilai koefisien regresi ( $b_1$ ) variabel pengetahuan dewan tentang anggaran adalah sebesar -3,749, nilai koefisien regresi ( $b_{10}$ ) variabel transparansi kebijakan publik sebesar -2,793 dan nilai koefisien regresi ( $b_{11}$ ) variabel moderating antara pengetahuan dewan dengan transparansi kebijakan publik adalah sebesar 0,148. Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil output tersebut, maka model regresi linear dapat di gambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_{10}X_6 + b_{11}X_1X_6 + e \quad (6)$$

$$Y = 145,827 - 3,749 X_1 - 2,793 X_6 + 0,148 X_1X_6 + e$$

Dari persamaan diperoleh nilai konstanta sebesar 145,827. Artinya, jika variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel dependen tidak

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dipengaruhi oleh variabel independennya (pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik bernilai nol), maka besar rata-rata pengawasan keuangan daerah (APBD) akan bernilai 145,827.

Koefisien regresi variabel  $X_1$  bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang searah untuk antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel  $Y$ . Nilai koefisien regresi ini ditunjukkan oleh angka sebesar 3,749 mengandung arti untuk setiap kenaikan pengetahuan dewan tentang anggaran  $X_1$  sebesar satu-satuan akan menyebabkan menurunnya pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar 3,749.

Koefisien regresi untuk variabel independen kedua ( $X_6$ ) menunjukkan nilai yang sama yaitu negatif dan tidak menunjukkan adanya hubungan yang searah antara transparansi kebijakan publik dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) atau variabel dependennya. Nilai dari koefisien regresi untuk  $X_6$  adalah 2,793, dimana angka ini mempunyai arti untuk setiap kenaikan variabel transparansi kebijakan publik sebesar satu-satuan, maka akan terjadi penurunan untuk variabel dependennya atau variabel pengawasan keuangan daerah sebesar nilai koefisien regresinya sebesar 2,793.

Tanda koefisien regresi untuk variabel moderator  $X_1X_6$  bernilai positif dengan nilai 0,148. Hal ini menyatakan bahwa variabel transparansi kebijakan publik memberikan penguatan untuk hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Setiap penambahan transparansi kebijakan publik ( $X_6$ ) sebesar satu-satuan akan menyebabkan bertambahnya

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_1$ ) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 0,148.

**Tabel 4.26**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di Moderasi Oleh Transparansi Kebijakan Publik**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 <sup>a</sup>	.640	.601	3.369

a. Predictors: (Constant), moderated\_6, PDTA, TKP

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 4.26 dapat dilihat nilai koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,601 atau 60,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderating mempunyai pengaruh sebesar 60,1% dan sisinya sebesar 39,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 4.27**  
**Uji F Statistik Untuk Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Yang di Moderasi Oleh Transparansi Kebijakan Publik**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	563.755	3	187.918	16.560	.000 <sup>b</sup>
	Residual	317.745	28	11.348		
	Total	881.500	31			

a. Dependent Variable: PKD

b. Predictors: (Constant), moderated\_6, PDTA, TKP

Sumber : Data Diolah

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil uji F didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 16,560 dengan (Sig) 0,000 dan diketahui pula bahwa nilai  $F_{tabel}$  menunjuk kepada angka 2,490. Karena (Sig) yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya variabel independen (pengetahuan dewan tentang anggaran) dan variabel pemoderating (transparansi kebijakan publik) mampu secara bersama-sama menjelaskan keragaman variabel dependennya (pengawasan keuangan daerah).

Selanjutnya, berdasarkan tabel *Coefficients* (lihat tabel 4.21), diketahui bahwa besarnya nilai  $t-test = 1,486$  dan nilai  $t_{tabel}$  bernilai 2,042, sedangkan besarnya signifikansi = 0,149 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh peneliti ditolak. Hal itu berarti, pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka peneliti meringkasnya ke dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 4.28**  
**Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

<b>Hipotesis</b>	<b>Keterangan</b>
Hipotesis Pertama	Mempunyai Pengaruh
Hipotesis Kedua	Mempunyai Pengaruh
Hipotesis Ketiga	Mempunyai Pengaruh
Hipotesis Keempat	Mempunyai Pengaruh
Hipotesis Kelima	Tidak Mempunyai Pengaruh
Hipotesis Keenam	Tidak Mempunyai Pengaruh

*Sumber : Data Diolah*

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

#### **4.5. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.5.1. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Berdasarkan hasil analisis regresi pada pengujian hipotesis pertama, dinyatakan bahwa hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti adalah diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Keterlibatan pengetahuan dewan tentang anggaran dalam mempengaruhi pengawasan keuangan daerah ditunjukkan dari nilai positif pada koefisien regresi yang sebesar positif 1,618. Selain itu, pengaruh variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah secara langsung adalah ditunjukkan pada nilai sebesar 42% pada *adjusted R Square*. Hal ini menunjukkan bahwa sisa pengaruh yang sebesar 58% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini berarti pengetahuan dewan tentang anggaran masih harus ditingkatkan kembali agar pengawasan keuangan daerah (APBD) di Kab. Purwakarta semakin efektif.

Sehubungan dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator penunjang pada kedua variabel ini sudah dimiliki oleh para anggota, seperti pengetahuan tentang penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, serta pengetahuan tentang pengawasan untuk menghindari kebocoran, pemborosan atau kegagalan terhadap pelaksanaan APBD.

Pada pengujian hipotesis pertama ini sesuai dengan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Sopanah dan Mardiasmo (2003),

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Rosseptalia (2006), Werimon, dkk (2007), Coryanata (2007), Pramita dan Adriyani (2010), dll.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kaho (2003:79) yang mengatakan bahwa “pengetahuan diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, dan untuk menjalankan fungsinya, maka diperlukanlah pendidikan dan pengalaman itu”. Hal serupa pun diungkapkan oleh Adisasmata (2011) sekaligus mendukung teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

Kemampuan kerja aparatur memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya. Oleh sebab itu peningkatan kemampuan aparatur selalu diarahkan pada pendidikan dan pelatihan serta memperluas pengalaman aparatur melalui studi-studi banding ke tempat lain.

Hal ini dapat dimakna bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, maka pengawasan terhadap keuangan daerah pun akan semakin efektif untuk menghindarkan dari hal-hal yang bersifat kecurangan baik itu dalam penyusunan anggaran sampai kepada pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu, jika dilihat kembali hasil deskriptif data mengenai pengetahuan dewan tentang anggaran yang mempunyai hasil ‘tinggi’ dan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan hasil yang ‘efektif’ maka dapat mempertegas hasil dari pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kaho dan Adisasmata diatas.

Seperti yang kita ketahui, kecurangan-kecurangan pada masa ini sangat merajalela, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik itu di dalam tubuh pemerintahan ataupun ranah politik yang dapat merugikan masyarakat maupun

**R. Putriana, 2014**

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara. Hal itu bisa terjadi karena kurang efektifnya pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Kurang efektif ini bisa disebabkan salah satunya oleh kurangnya pengetahuan dewan tentang anggaran. Pengetahuan ini menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas pekerjaannya.

#### **4.5.2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Berdasarkan hasil analisis regresi pada pengujian hipotesis kedua ini, menyatakan bahwa hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti adalah diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi oleh budaya organisasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Keterlibatan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan budaya organisasi dalam mempengaruhi pengawasan keuangan daerah pun ditunjukkan oleh nilai positif pada koefisien regresi yang sebesar 0,173. Maka semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi oleh budaya organisasi, akan semakin efektif pula pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh badan legislatif.

Selain itu,  $F_{hitung}$  pada output menyatakan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan variabel pemoderatannya budaya organisasi

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



berpengaruh bersama-sama sebesar 28,488 untuk menjelaskan atau menggambarkan pengawasan keuangan daerah.

Dan dari perhitungan *adjusted R Square* menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh pengetahuan dewan tentang anggaran dan budaya organisasi sebesar 42,9%. Dan sisanya sebesar 57,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain atau faktor-faktor lain.

Perolehan hasil dari pengujian hipotesis pertama ini sesuai dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sardjito dan Muthaher (2007), Trisnaningsih (2007) dan Purba (2011). Hasil ini diperkuat jika dikaitkan dengan hasil deskriptif data yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang ada di lingkungan DPRD mempunyai hasil yang 'kondusif', pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai hasil 'tinggi', dan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan hasil 'efektif'. Maka dapat disederhakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran yang tinggi dapat lebih mengefektifkan pengawasan keuangan daerah (APBD) jika didukung oleh budaya organisasi di lingkungan DPRD yang kondusif. Karena budaya organisasi secara sisi internal diri dewan akan memberikan sugesti terhadap semua perilaku yang diusulkan oleh organisasi agar dapat diselesaikan dengan baik dan sukses (Trisnaningsih, 2007).

Dari hasil pengujian hipotesis ini membuktikan fungsi budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robbins (2002:283), yaitu budaya bertugas pembentuk

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rasa dan mekanismen pengendalian yang memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan.

Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa indikator budaya organisasi yang berorientasi pada orang/pegawai dan pekerjaan berjalan kondusif dan meningkatkan/memperkuat pengaruh pada variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang disusun oleh anggota dewan itu mencerminkan bahwa keputusan-keputusan penting dalam menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran dibuat secara kelompok daripada dibuat secara individu.

#### **4.5.3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Pembahasan berikutnya adalah untuk mengetahui keputusan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini diperoleh dari nilai signifikansi  $< 0,05$ , yaitu  $0,042$ . Pengaruh ini didukung oleh koefisien regresi dari variabel moderating yang bernilai positif  $0,090$ . Selain itu, besarnya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependennya adalah sebesar  $73,7\%$ . Artinya, pengetahuan dewan tentang

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

anggaran dengan komitmen organisasi mempunyai kemampuan untuk menjelaskan variasi atau keberagaman variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar 73,7% dan sisnya dipengaruhi oleh variabel/faktor lain.

Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian sebelumnya, seperti Sardjito dan Muthaher (2007), Pramita dan Adriyani (2010). Semakin tinggi komitmen yang dimiliki oleh anggota dewan, maka ia akan berusaha semaksimal untuk menyusun anggaran sesuai dengan yang diperlukan, dan pada saat pelaksanaannya akan digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Begipula sebaliknya, semakin rendah komitmen anggota dewan, maka akan semakin rendah/minimal pula usaha dewan untuk menjalankan segala tugas dan fungsinya.

Meyer dan Allen (dalam Setiawan : 2011), merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam organisasi sebagai suatu karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Dengan adanya komitmen dapat menjadikan suatu dorongan dan motivasi bagi anggota dewan untuk bertahan sebagai bagian dari organisasi dan bekerja lebih baik. Anggota dewan yang komit terhadap organisasinya akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap keterlibatan dirinya dalam organisasi lembaganya, dan memiliki loyalitas dan keyakinan untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dan jika dikaitkan dengan hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa anggota dewan DPRD Kab. Purwakarta telah mempunyai komitmen yang tinggi.

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hal ini sesuai dengan hasil deskriptif data berdasarkan hasil kuesioner yang diisikan oleh para anggota dewan. Komitmen yang tinggi tercermin dari pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Selain itu, tuntutan masa kerja anggota dewan selama 5 tahun menjadi salah satu faktor bagi anggota dewan dituntut untuk mengoptimalkan diri dan fungsi pekerjaannya untuk pencapaian yang telah direncanakan.

#### **4.5.4. Pengaruh Prinsip Good Governance Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

##### **4.5.4.1. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dinyatakan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Kesimpulan ini ditunjang oleh koefisien regresi yang bernilai positif 0,148. Selain itu, partisipasi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik memberikan pengaruh sebesar 64,7% terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang ditunjukkan oleh output *adjusted R Square*, dan sisanya sebesar 35,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Rosseptalia (2006), Coryanata (2007), Pramita dan Adriyani (2010) yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Menurut Bovens, *“Public accountability is not just the hallmark of democratic governance, it is also a sine qua non for democratic governance”*. Jika dilihat dari konsep *good governance*, prinsip akuntabilitas publik ini dapat tercapai apabila didukung peraturan perundang-undangan serta mekanisme pertanggungjawabannya karena akuntabilitas merupakan alat pengukuran dalam mewujudkan *good governance* bagi pemerintahan. Karena akuntabilitas publik ini menjadi kontrol demokratis dimana setiap orang ingin memegang peranannya untuk menilai kinerja pemerintahan, dalam kasus ini adalah pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD. Selain itu, akuntabilitas dapat meningkatkan integritas pemerintahan umum karena publik mempunyai peran sebagai ‘pelindung’ dari korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan perilaku-perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas publik ini, dapat meningkatkan kinerja para anggota dewan untuk bekerja sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Krina (2003), bahwa akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Dan dalam hasil penelitian ini menggambarkan bahwa anggota DPRD Kab. Purwakarta mampu mengimplementasi peraturan perundangan itu dengan baik, sehingga akuntabilitas publik dapat berjalan dengan baik (akuntabel).

#### **4.5.4.2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Namun mempunyai koefisien regresi yang bernilai positif 0,127. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan dewan dengan pengawasan, namun partisipasi masyarakat masih mempunyai hubungan yang positif. Hubungan positif ini dapat ditunjukkan oleh *adjusted R Square* yang mempunyai nilai 67,2%. Artinya, hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat mampu menjelaskan atau memaparkan pengawasan keuangan daerah sebesar 67,2%, dan sisanya yang sebesar 32,8% di jelaskan oleh variabel atau faktor lain.

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002:70).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Sopanah dan Wahyudi (2007), Coryanata (2007), Pramita dan Andriyani (2010), Mayasari (2012), dan Rosseptalia (2006) mendukung apa yang dikemukakan oleh Mardiasmo, yaitu menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Kontribusi masyarakat dalam penyusunan anggaran diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, penjangkauan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi dari DPRD Kabupaten/Kota. Dimana DPRD mempunyai kewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Namun setelah dilakukannya penelitian, hasil pengujian hipotesis kelima ini justru didapatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan semestinya seperti penelitian yang dilakukan oleh Simson Werimon, dkk (2007) yang ternyata menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dalam penelitian ini, dapat disebabkan oleh ketidak-maksimalannya anggota dewan di Kab. Purwakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memperkuat indikator-indikator pendukung seperti, untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD, kurang dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan APBD, advokasi, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Atau dapat disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat itu sendiri yang tidak tahu bahwa aspirasi mereka justru punya andil yang cukup besar dalam melakukan penyusunan anggaran serta pengawasan sehingga mereka kurang memberikan atau terbuka terhadap masukan dan kritikan yang berkenaan dengan prioritas, rencana APBD dan revisi APBD.

Namun hasil pengujian hipotesis kelima ini tidak sesuai dengan deskriptif data yang diperoleh peneliti yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dinyatakan 'tinggi'. Hal ini dikarenakan oleh anggota dewan yang sebenarnya paham mengenai partisipasi masyarakat dengan pengetahuan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), namun tidak berpengaruh secara langsung dalam kenyataannya. Sehingga partisipasi masyarakat ini masih hanya sekedar teori yang belum dipraktekkan oleh anggota dewan. Diharapkan para anggota dewan lebih sadar mengenai pentingnya partisipasi



masyarakat ini untuk memperkuat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap penawasan keuangan daerah.

#### **4.5.4.3. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Berdasarkan analisis data untuk pengujian hipotesis yang keenam ini menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini dibuktikan dengan uji-t dengan nilai  $> 0,05$  yaitu 0,149. Meskipun transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh, namun variabel ini masih mempunyai hubungan. Dan hubungan ini dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,148. Selain itu, sebesar 60,1% menyatakan bahwa hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik mampu menjelaskan variasi variabel pengawasan keuangan daerah (APBD). Sisanya sebesar 39,9% dipengaruhi oleh sebab/faktor lain.

Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Isma Coryata (2007), Rima Rosseptalia (2006)

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang mengatakan bahwa transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Kemajuan teknologi yang pesat menjadi sarana untuk pendukung diadakannya transparansi kebijakan publik. Hal ini dapat membuka peluang bagi masyarakat atau publik untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi yang cepat, tepat, akurat serta efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Akan tetapi, hasil pengujian hipotesis keenam pada penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian diatas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak memperkuat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Werimon, dkk (2007), Sopanah dan Isa Wahyudi (2007), Pramita dan Andriyani (2010), dan Rosalina Pebrica Mayasari (2012).

Tidak memperkuatnya variabel transparansi kebijakan publik dalam mempengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) ini tidak sesuai dengan deskriptif data menyatakan bahwa transparansi yang dilakukan DPRD dapat dikatakan tinggi (transparan). Alasan yang mengakibatkan tidak memperkuatnya variabel transparansi kebijakan publik adalah dapat dikarenakan ketidak-optimalan anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyediakan pengumuman mengenai kebijakan anggaran, ketersediaannya akses untuk mengunduh

R. Putriana, 2014

*Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dokumen anggaran, penyaluran suara atau usulan dari rakyat tidak terakomodasi dengan baik, sistem yang disediakan terasa sulit untuk digunakan publik mengingat pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses melalui teknologi setaip warga masyarakat berbeda-beda, dll. Hasil pengujian hipotesis keenam ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) bahwa transparansi kebijakan publik ini masih dalam tahap retorika dan implementasinya masih dalam formalitas.

Dari hasil pembahasan ini diharapkan bahwa para anggota dewan lebih sadar mengenai peranan tranparansi kebijakan publik dalam memperkuat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawsasan keuangan daerah, dengan mencari/menambah, memaksimalkan indikator-indikator yang mendukung terlaksananya transparansi kebijakan publik dengan baik.